

Penerapan *Agile Governance* pada Program Satu Data UMKM sebagai Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman

The Application of Agile Governance in The MSME One Data Program as an Empowerment of MSMEs in Sleman Regency

Fani Uswatun Hasanah¹, Titis Dewi Anggalini²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 05-08-24

Diperbaiki 08-08-24

Disetujui 12-08-24

Kata Kunci:

Agile Governance,
Teknologi, Pelayanan
Publik, UMKM

Keywords:

Agile Governance,
Teknologi, Pelayanan
Publik, UMKM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *agile governance* pada program Satu Data UMKM serta mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya sebagai pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu, sumber data primer dan sekunder. Subjek data penelitian adalah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, Operator Satu Data UMKM Kalurahan Caturtunggal, dan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *agile governance* dibuktikan melalui program Satu Data UMKM di Kabupaten Sleman. Satu Data UMKM menjadi langkah pemberdayaan UMKM melalui banyak fasilitasi, seperti pendampingan PIRT, pelatihan *digital marketing*, pelatihan pembuatan produk, pelatihan *design* produk, dan ikut serta dalam pameran produk. Namun, penerapan program Satu Data UMKM belum berjalan optimal karena masih menemui permasalahan, yaitu belum semua masyarakat paham tentang teknologi dan belum tersedianya layanan pengaduan langsung yang terintegrasi ke sistem Satu Data UMKM.

ABSTRACT

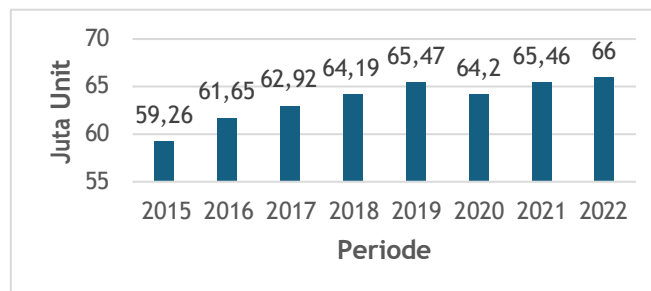
This research aims to determine the application of agile governance principles in the One Data MSME program and to find out the driving and inhibiting factors as MSME empowerment. This research uses a qualitative descriptive research method. Data collection through observation, interviews, and documentation. The sources of research data are primary and secondary data sources. The subjects of the research data are employees of the Sleman Regency Cooperatives and SMEs Office, the Operator of One Data MSMEs of Caturtunggal Village, and MSME actors in Sleman Regency. The main instrument of this research is the researcher himself. The data validity technique uses the source triangulation technique, while the data analysis technique is through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion making. The results of the research show that agile governance is proven through the One Data MSME program in Sleman Regency. One MSME Data is a step to empower MSMEs through many facilitations, such as PIRT assistance, digital marketing training, product manufacturing training, product design training, and participating in product exhibitions. However, the implementation of the One Data MSME program has not run optimally because it still encounters problems, namely that not all people understand technology and there is no direct complaint service integrated into the One Data MSME system.

1 Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 merupakan era berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, telepon, dan komputer [1]. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi organisasi sektor publik untuk menggeser budaya dan aktivitas organisasi dari berbasis manual ke elektronik. Revolusi industri 4.0 telah mendorong adanya reformasi birokrasi yang berbasis digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima [2]. Ketidakpastian kondisi di dunia telah mengubah fungsi teknologi ke arah yang lebih masif, yaitu penguatan bidang ekonomi agar dapat bersaing lebih luas.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan *agile governance* demi menghadapi kondisi yang menuntut perubahan secara cepat dan tidak pasti [3]. Konsep *agile governance* awalnya dicetuskan dalam sistem manajemen di sektor privat, kemudian berkembang pada tahun 2019 di *World Economic Forum*. *Agile governance* merupakan kemampuan secara cepat dan adaptif dalam menciptakan inovasi [4]. Konsep ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas serta transparansi [5]. Sistem manajemen akan lebih efisien melalui pemanfaatan *big data analytics* untuk mengantisipasi lingkungan organisasi yang disruptif [3].

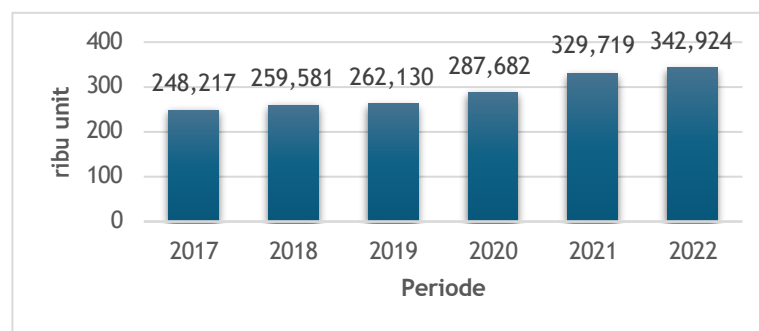
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap persaingan ekonomi secara global sehingga Indonesia memiliki tantangan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang adaptif, kreatif, dan kompetitif. Pelayanan publik di bidang ekonomi sudah menggunakan *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) membantu pelayanan yang cepat, terstruktur, dan praktis karena dapat diakses melalui *handphone* [6]. Menurut teori Charles O. Jones, implementasi suatu program dipengaruhi oleh organisasi, interpretasi, dan aplikasi [7]. Pemerintah atau negara berperan dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi di bidang ekonomi [8]. Salah satu langkah pemerintah dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong serta memotivasi masyarakat dalam pengembangan potensi [9]. UMKM memiliki posisi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. UMKM telah menjadi penggerak perekonomian Indonesia dengan memberikan sumbangsih terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2% dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%. Peran UMKM terhadap perekonomian nasional dapat ditunjukkan melalui data pertumbuhan UMKM dari tahun 2015 - 2022.



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kontribusi ekspor UMKM naik pada tahun 2021 sebesar 1,32%. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan pentingnya UMKM pada acara *High Level – Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs* dalam rangka ASEAN Chairmanship 2023, bahwa di tingkat regional ASEAN, sektor UMKM mampu mempekerjakan 35-97% individu dan berkontribusi sebesar 35-36% terhadap GDP negara-negara anggota. Sektor UMKM memiliki peranan penting untuk menumbuhkan perekonomian secara merata di Provinsi DIY. Berdasarkan data yang dihimpun dari kajian fiskal regional pada tahun 2022, UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 23-25 persen. Pertumbuhan UMKM di DIY semakin meningkat dari tahun 2017 hingga 2022, yang ditunjukkan melalui grafik berikut.



Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi DIY

(Sumber: Kajian Fiskal Regional DIY Tahun 2022)

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah di Provinsi DIY yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang besar. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman pada tahun 2023, UMKM mengalami peningkatan sebesar 19 ribu unit. Kemudian, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman yaitu 111.757 ribu, dengan rincian 111.578 usaha mikro, 168 usaha kecil, dan 11 usaha menengah. Namun, menurut sumber berita dari katadata pada tahun 2020, penurunan ekonomi di Sleman menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Kulon Progo, yakni sebesar 3,91%, yang dipengaruhi oleh kendala pelaku UMKM dalam proses pemasaran. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, pencatatan usaha masih secara manual sehingga data-data terkait perkembangan usaha tidak dapat diperbarui secara efisien. Selain itu, kesadaran dalam mengurus legalitas usaha masih kurang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Usaha Kecil dan Menengah belum mendapatkan fasilitas pelatihan, konsultasi, dan pendampingan secara merata. Berdasarkan survei Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020, sebanyak 5 (lima) ribu UMKM kesulitan dalam memasarkan produknya. Kemampuan para pelaku UMKM dalam memperkenalkan produk secara lebih luas juga masih kurang karena minimnya pemahaman digitalisasi. Selain itu, data dari Dinas Koperasi dan UKM Sleman juga menunjukkan bahwa masyarakat yang berusia 45 tahun ke atas mayoritas masih kesulitan dalam mengoperasikan teknologi digital, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Di era ekonomi digital, UMKM harus memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi secara *sustainable* dan inovatif. Oleh

karena itu, pemberdayaan UMKM harus terintegrasi dengan teknologi melalui penciptaan sarana dan prasarana yang baik.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui penerapan *agile governance* pada program Satu Data UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Sleman sebagai langkah pemberdayaan UMKM. Upaya pemberdayaan UMKM telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah DIY Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas sarana prasarana serta ketersediaan teknologi informasi sangat diperlukan. Dinas Koperasi dan UKM Sleman menyelenggarakan Satu Data UMKM sebagai bentuk responsivitas kegiatan perekonomian di era digital. Satu Data UMKM merupakan pelayanan publik di bidang ekonomi melalui pemanfaatan aplikasi dan *website* dengan menyediakan fasilitas pendampingan, pelatihan, perizinan, pengembangan usaha, dan keikutsertaan dalam pameran produk unggulan, serta pembiayaan berupa pinjaman ataupun hibah. Tindakan pemerintah tersebut dapat dijelaskan melalui konsep tata kelola pemerintahan, yaitu *agile governance*. Pada organisasi publik, konsep *agile governance* bermakna adaptif dan antisipatif terhadap tantangan serta peluang revolusi industri 4.0 [3]. Peneliti menggunakan 6 (enam) prinsip *agile governance*, yaitu *good enough governance* (tata kelola yang cukup baik), *business-driven* (berbasis bisnis), *human focused* (berfokus pada sumber daya manusia), *based on quick wins* (berdasarkan kemenangan cepat), *systematics and adaptive approach* (pendekatan sistematis dan adaptif), dan *simple design and continous refinement* (desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan [10].

Urgensi penelitian ini adalah menunjukkan penerapan prinsip tata kelola yang gesit (*agile*) pada program Satu Data UMKM sebagai pemberdayaan UMKM di era digital. Peneliti juga ingin mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan Satu Data UMKM sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Sleman. Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih menekankan penerapan prinsip *agile governance* pada program Satu Data UMKM sebagai pemberdayaan UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Berbagai penelitian lain masih memiliki kekurangan pada optimalisasi dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat [11]. Sementara itu, penelitian ini berkaitan dengan bidang administrasi publik yang memfokuskan pada pelayanan masyarakat secara *agile* melalui Satu Data UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman sebagai langkah pemberdayaan UMKM. Organisasi publik seperti Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara gesit (*agile*) melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, menggunakan analisis data induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Karakteristik penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dengan menyajikan data berupa kata-kata atau gambar dan menekankan pada proses daripada produk atau *outcome* (Sugiyono, 2019: 23). Peneliti bermaksud untuk menggali penerapan prinsip agile governance program Satu Data UMKM sebagai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sleman beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Sleman yang beralamat di Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Sleman serta beberapa wilayah di Kabupaten Sleman. Lokasi tersebut diambil peneliti karena adanya kesesuaian dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan sekitar bulan Maret hingga Juli tahun 2024. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari pegawai dari Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Operator Satu Data UMKM Kalurahan Caturtunggal, serta pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, arsip pemerintah seperti laporan tahunan, *website* resmi pemerintah, serta data statistik dari berita. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, peneliti melakukan observasi di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman untuk mengetahui informasi tentang proses pelaksanaan Satu Data UMKM. Selain itu, observasi juga dilakukan di Kalurahan Caturtunggal untuk mengetahui peran operator Satu Data UMKM serta di beberapa wilayah Kabupaten Sleman untuk mengamati UMKM. Obyek pengamatan dari penelitian ini adalah program Satu Data UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman dan bagaimana program tersebut dapat memberdayakan UMKM.
- b. Wawancara, peneliti sebelumnya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam pengumpulan data tetapi pertanyaan bisa berubah menyesuaikan dengan situasi dan jalannya percakapan saat wawancara dilaksanakan. Wawancara dilaksanakan dengan menghubungi Dinas Koperasi dan UKM Sleman terlebih dahulu yang mengelola secara penuh Satu Data UMKM, kemudian dinas tersebut memberikan data-data UMKM secara keseluruhan. Kemudian, wawancara dilakukan dengan operator Satu Data UMKM untuk mengetahui lebih jauh tentang peran operator. Setelah itu, wawancara dilakukan kepada masyarakat yang memiliki UMKM berdasarkan rekomendasi dari data yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Sleman.
- c. Dokumentasi, penelitian ini memerlukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan program Satu Data UMKM. Peneliti melakukan dokumentasi dengan menulis, merekam, serta mengambil foto yang terkait dengan pelaksanaan Satu Data UMKM, seperti aplikasi, *website*, pelayanan kepada masyarakat, bimtek, sosialisasi. Adapun dokumen pendukung untuk penelitian ini yaitu jurnal, laporan pemerintah, dan berita yang terkait dengan topik penelitian. Studi dokumentasi bertujuan untuk menemukan dokumen

dan data-data yang dapat mendukung penelitian sehingga hasil penelitian semakin kredibel.

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data dengan pengecekan data yang didapatkan dari beberapa sumber. Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan teori dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti merangkum data kemudian mendeskripsikan dalam bentuk teks dan naratif. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian pembahasan dijelaskan mengenai penerapan agile governance pada program Satu Data UMKM sebagai pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman, menurut indikator *good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, simple design, dan continuous refinement*.

3.1 Good Enough Governance

Governance merupakan suatu konsep pengelolaan mengenai jalannya tugas dan fungsi organisasi sektor publik atau sektor privat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. *Good enough governance* memfokuskan pada nilai kapabilitas dan konteks tata kelola dalam organisasi [12]. Program Satu Data UMKM merupakan bentuk respon dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Keterbatasan ruang gerak pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam memasarkan produknya. Jadi, kemampuan pelaku UMKM dalam menjaring usaha tidak optimal sehingga perlu campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Organisasi yang berfokus pada pelayanan publik akan mengutamakan sasaran dan hasil yang sesuai dengan kebutuhan [13]. Satu Data UMKM juga berpengaruh pada budaya kinerja pegawai yang lebih efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti laptop, komputer, dan jaringan internet juga menunjang keberhasilan dalam program Satu Data UMKM. Berdasarkan Peraturan DIY Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil, Satu Data UMKM adalah bentuk penyediaan fasilitas teknologi informasi, sarana prasarana, pemasaran, dan pendampingan sumber daya manusia. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Sleman berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian melalui fasilitasi pengembangan usaha. Pelaksanaan program Satu Data UMKM melibatkan beberapa OPD sejumlah 12 (dua belas) yang tersebar di kapanewon dan kalurahan, 2 (dua) operator di 17 (tujuh belas) kapanewon, pihak ketiga/penyedia, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia, ada kegiatan bimtek yang dilaksanakan kurang lebih satu tahun sekali yang bertujuan agar operator Satu Data memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses

aplikasi dan *website*. Setiap kalurahan memiliki satu operator Satu Data UMKM. *Good enough governance* memiliki elemen utama berupa transparansi, kemudahan dalam akses informasi, daya tanggap, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya [14]. Pengguna aplikasi maupun *website* Satu Data UMKM juga dapat mengetahui dan melacak informasi perkembangan riwayat layanan UMKM. Hal tersebut menunjukkan bentuk keterbukaan dan kemudahan dalam pelayanan publik.

3.2 *Business driven*

Business-driven merupakan suatu sistem yang berarti bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi harus mempertimbangkan aspek bisnis [4]. Kemampuan dalam mengatur organisasi dengan memberikan arah, koordinasi, pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang efektif. Penyempurnaan proses bisnis dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perubahan yang didorong dengan teknologi informasi. Pada pelayanan Satu Data UMKM, dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan. Setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya, mereka dapat mendatangi langsung ke kantor atau mendaftarkan secara mandiri melalui aplikasi Satu Data UMKM. Kemudian, verifikasi data dilakukan oleh petugas Dinas Koperasi dan UKM secara online. Pelayanan Satu Data UMKM telah memenuhi prinsip standar data, memiliki metadata yang berbentuk informasi untuk memudahkan pencarian, penggunaan hingga pengelolaan informasi. Standar data yang dimaksud dalam Satu Data UMKM adalah memuat definisi, klasifikasi, serta ukuran. Pada *website* Satu Data UMKM, petugas juga memasukkan data-data secara *real time*. Begitupun pada aplikasinya, masyarakat yang mengajukan pendaftaran UMKM akan terlihat progresnya, terkait waktu dan tahapannya sampai mana. Ketangkasan yang efektif dilakukan dengan penerapan *Real Time Eligibility* (RTE), yaitu desain sistem yang membantu organisasi mengotomatiskan proses di berbagai sistem, tujuan utamanya yaitu memberikan informasi secara *real time* kepada pelanggan serta pemangku kepentingan [15]. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi nilai bisnis karena masyarakat yang telah mendaftarkan usahanya otomatis akan memperoleh program pengembangan UMKM, termasuk jangkauan pemasaran yang lebih luas. Sesuai dengan permasalahan di Sleman, masyarakat sebagai pelaku usaha belum mendapatkan fasilitas pelatihan, konsultasi, dan pendampingan secara merata. Selain itu, fasilitasi yang diberikan dari program Satu Data UMKM mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan dalam pemasaran.

3.3 *Human Focused*

Human focused merupakan prinsip yang digunakan untuk mengukur keterlibatan Sumber Daya Manusia pada pelaksanaan Satu Data UMKM. Masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Sumber Daya Manusia menjadi elemen kunci perubahan dan kekuatan pendorong dalam organisasi [4]. Hal tersebut

juga menjadi perantara komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat karena mereka merasakan fasilitas-fasilitas pelayanan [3]. Masyarakat berpartisipasi pada proses pengaduan atau penyampaian aspirasi melalui *chat boot* yang dikelola oleh admin di *website* Satu Data UMKM atau melalui *chat whatsapp* dan media sosial instagram. Layanan E-PPID juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna Satu Data UMKM untuk menyampaikan permasalahan ataupun masukan kepada pihak dinas. Pengguna dapat menuliskan kritik, saran, dan pertanyaan melalui email ppid@slemankab.go.id. Penyedia layanan publik harus memberikan fasilitas pengaduan masyarakat [16]. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, ataupun sarannya melalui kolom ulasan aplikasi di laman *playstore*. Sebagian masyarakat sebagai pengguna menyampaikan kritiknya bahwa alur pendaftaran usaha masih terkesan kurang singkat. Masyarakat menyampaikan bahwa setelah proses pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih ada proses selanjutnya yang perlu dilengkapi. Menurut hasil wawancara, setelah mengisi data sesuai dengan KTP, tahapan yang dulu otomatis langsung terisi pada sistem. Permasalahan tersebut disebabkan adanya pembatasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang dilatarbelakangi oleh keputusan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021. Ada beberapa *rating* positif dan negatif dari masyarakat, diantaranya ada yang mengeluhkan proses pendaftaran yang tidak lancar karena setelah memasukkan NIK justru tidak bisa masuk. Selain itu, masyarakat juga kurang paham dalam menggunakan aplikasi, khususnya bagi masyarakat yang kategorinya sudah lanjut usia. Selain masyarakat, komunikasi dengan aktor juga dilakukan secara intens ketika menjelang bimbingan teknis. Penciptaan mekanisme yang efektif untuk mendukung hubungan dan komunikasi di antara orang-orang sangatlah penting [4]. Keterlibatan masyarakat penting dalam implementasi, pembagian manfaat dan evaluasi program [14]. Fasilitas dari Satu Data UMKM memberikan peran penting bagi kehidupan masyarakat melalui program pengembangan UMKM. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan efektivitas dalam pelayanan publik, khususnya pada konteks penelitian ini.

3.4 *Based on quick wins*

Based on quick wins digunakan untuk mengetahui bagaimana kecepatan dan ketepatan layanan pada program Satu Data UMKM. Pemerintah perlu menunjukkan respon positif dalam menghadapi persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat [17]. Organisasi Perangkat Daerah harus menangani dengan serius untuk mendapatkan hasil yang baik. Pada indikator ini, keberhasilan yang diperoleh secara cepat dapat menjadi motivasi untuk mendapatkan lebih banyak *outcome* [4]. Satu Data UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi dengan tujuan mencapai kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan UMKM. Organisasi yang gesit dinilai sebagai kemampuan untuk bertahan dan berkembang di lingkungan yang kompetitif dengan bereaksi cepat serta efektif [15]. Masyarakat

yang ingin mendaftarkan usahanya tidak perlu mengantri di kantor, cukup mengunjungi laman *website* atau *download* aplikasi satu data UMKM. Data-data yang ada di *website* bersifat *real time*, artinya setiap perubahan atau penambahan data nanti langsung *ter-update*. Masyarakat sebagai pengguna aplikasi dan *website* juga diberikan petunjuk tentang cara penggunaan Satu Data. Petunjuk tersebut berbentuk dokumen yang tersedia pada aplikasi, dimana pengguna dapat mengunduhnya secara *real time*. Dalam penggunaan aplikasi dan *website*, keberadaan operator juga mempercepat layanan. Aspek ketepatan dilihat dari pembentukan *database* yang bermula dari data-data yang belum menyatu. Pada formulir pendaftaran secara *online*, tersedia tempat untuk mengisi detail produk, detail jasa yang dihasilkan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak wajib di isikan karena belum semua masyarakat memilikinya. Dinas Koperasi dan UKM Sleman memiliki Indikator Kinerja Utama terkait Satu Data UMKM yaitu, peningkatan jumlah UMKM, peningkatan jumlah wirausaha muda, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan aset dan omset. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan pendataan UMKM yang diterapkan pada Satu Data UMKM. Fasilitas pengembangan UMKM menunjukkan capaian pertumbuhan omset para pelaku usaha.

3.5 *Systematics and adaptive approach*

Pendekatan sistematis dan adaptif mewujudkan birokrasi yang *agile* dan inovatif sehingga cara kerja menjadi lebih adaptif, responsif, dan terbuka [18]. *Systematics and adaptive approach* adalah organisasi harus mengembangkan kemampuan intrinsik untuk merespon perubahan secara sistematis [4]. Adanya Satu Data UMKM menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman menanggapi kondisi lingkungan yang semakin berkembang. Penggunaan aplikasi dan *website* dalam pelayanan UMKM adalah bentuk adaptasi untuk menciptakan birokrasi yang cerdas. Saat ini, transisi ke teknologi telah meluas di semua bidang aktivitas manusia [19]. Penilaian-penilaian dari pelaku usaha terkait Satu Data UMKM juga menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk terus mengembangkan program tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting untuk mengetahui kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana mengatasinya. Pemantauan dianggap sebagai alat untuk membantu pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya meningkatkan cara kegiatan operasionalnya dilakukan untuk mencapai tujuan strategis [20]. Performa organisasi dan perbaikan pola kerja dapat ditingkatkan melalui tindakan yang *agile* serta pelaksanaan fungsi evaluasi yang baik [3]. Aplikasi dan *website* Satu Data berkembang dan beradaptasi, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada kendala-kendala di lapangan yang biasa terjadi. Fitur yang disediakan pada aplikasi dan *website* sederhana, bertujuan untuk memudahkan penggunaan bagi masyarakat sebagai pelaku usaha. Pada tahun 2022, ada peningkatan versi serta perbaikan tampilan *website* dan aplikasi satu data UMKM. Perbaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan performa sistem sehingga layanan kepada masyarakat semakin memuaskan. Pemerintahan yang *agile* selalu memperhatikan perbaikan-perbaikan

kecil dan melaksanakan evaluasi secara berlanjut, berorientasi pada kecepatan perubahan untuk menemukan solusi [21].

3.6 *Simple design and continous refinement*

Simple design and continous refinement merupakan upaya untuk mewujudkan desain yang sederhana dan terus mengembangkan secara berkelanjutan [4]. Organisasi perlu mengadopsi desain yang sederhana serta mempertimbangkan berbagai hal sebagai evaluasi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan dari hasil penelitian, desain aplikasi dan *website* masih sederhana, seperti tampilan dan warnanya. Hal tersebut menjadi pertimbangan agar pengguna merasa lebih mudah dan nyaman dalam mengakses pelayanan UMKM. Operator Satu Data UMKM menyatakan bahwa perkembangan aplikasi dan website masih terus dilaksanakan, mengingat fitur-fiturnya juga belum sempurna. Selain itu, fasilitasi yang diperoleh masyarakat mendukung pengembangan usaha serta peningkatan akses pasar. Program Satu Data dikembangkan secara terus menerus hingga saat ini. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya penyempurnaan aplikasi dan *website* yang dilakukan secara bertahap. Penggunaan *website* didasarkan pada percepatan aksesibilitasnya. Fitur-fitur yang dicantumkan sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh siapapun yang mengaksesnya. Jadi, pelaksanaan Satu Data UMKM melalui aplikasi dan *website* telah memenuhi prinsip bahwa pekerjaan sederhana lebih baik serta menghasilkan hasil yang memuaskan daripada harus memilih desain yang terlalu rumit, tetapi pengguna kesulitan dalam mengakses [12]. Berdasarkan hasil wawancara, Satu Data UMKM diperlukan perbaikan karena terkadang sistem mengalami *bug*, terutama jika digunakan dalam waktu bersamaan. Selain itu, pelaku usaha juga mengeluhkan bahwa ketika ingin *login* kembali pada aplikasi atau *website*, akun yang dimasukkan tidak *valid*. Kemudian, sosialisasi terkait Satu Data UMKM dilakukan bersamaan dengan *workshop* kewirausahaan karena tidak ada anggaran khususnya. Hal tersebut yang menjadi evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman untuk terus mengembangkan sistem menjadi lebih baik. Fasilitasi yang diberikan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan

4 **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *agile governance* dibuktikan melalui program Satu Data UMKM yang memberikan manfaat terhadap pengembangan UMKM di Sleman, seperti pelatihan wirausaha, perizinan usaha, dan keikutsertaan pameran produk. Pelaksanaan program Satu Data UMKM telah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk melaksanakan Satu Data UMKM yang juga membantu akses perluasan pasar bagi pelaku usaha yang terdaftar. Berdasarkan hasil penelitian, Satu Data UMKM memudahkan pelayanan UMKM bagi masyarakat Kabupaten Sleman karena bersifat praktis dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan dalam Satu Data UMKM didukung dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemanfaatan aplikasi dan *website* Satu Data UMKM membuat data UMKM sifatnya *real time* dan akurat.

Program Satu Data UMKM telah dilaksanakan sesuai pada indikator *good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, simple design and continuous refinement*. Namun, pelaksanaan Satu Data UMKM masih menemui beberapa kendala, seperti pada indikator *human focused* yang menunjukkan bahwa belum semua masyarakat paham tentang teknologi. Pada indikator *simple design and continuous refinement* juga masih menemui permasalahan pada bagian fitur aplikasi dan *website* Satu Data, dimana belum tersedia layanan pengaduan langsung yang terintegrasi ke sistem Satu Data UMKM. Desain aplikasi juga sederhana untuk memudahkan dalam proses penggunaan. Proses pengembangan aplikasi dan *website* masih terus dilakukan agar kualitas layanan semakin baik. Selain itu, kemampuan menggunakan teknologi pada masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Aplikasi Satu Data UMKM juga mengalami kendala sistem yang menyebabkan pengguna kesulitan dalam mengaksesnya. Aplikasi tersebut belum bisa diakses pada pengguna yang memiliki *handphone* iOS. Proses perbaikan anggaran juga masih disusun dalam *draft* rancangan peraturan bupati (raperbup) terkait dengan kegiatan sosialisasi dan *updating* Satu Data UMKM. Proses *monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk mengontrol serta mengawasi jalannya penerapan Satu Data UMKM. Upaya tersebut mampu mendorong perbaikan pelayanan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kepada pihak terkait yang terlibat untuk mengembangkan Satu Data UMKM menjadi lebih baik. Dinas Koperasi dan UKM Sleman perlu melakukan optimalisasi fitur-fitur serta kapabilitas sumber daya manusia perlu dijalankan agar layanan Satu Data UMKM semakin berkembang. Perbaikan sistem pada aplikasi maupun *website* Satu Data UMKM perlu dilakukan agar pengguna merasa nyaman. Selain itu, perlu penambahan fitur *helpdesk* atau pengaduan agar keluhan pengguna terintegrasi langsung pada sistem Satu Data UMKM serta memperbaiki tampilan aplikasi dan *website* agar lebih interaktif dan menarik. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah meninjau keberlanjutan dan efektivitas program Satu Data UMKM.

Referensi

- [1] V. Soundararajan, S. Sahasranamam, Z. Khan, and T. Jain, "Multinational enterprises and the governance of sustainability practices in emerging market supply chains: An agile governance perspective," *J. World Bus.*, vol. 56, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jwb.2020.101149.
- [2] Padmaningrum, "Penyederhanaan Birokrasi Melalui Agile Governance Menuju Layanan Prima," 2021. [Online]. Available: <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan>.
- [3] Busri, Ihyani Malik, and Nur Wahid, "Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar," *J. Adm. Publik*, vol. 19, no. 1, pp. 85–119, Jun. 2023, doi: 10.52316/jap.v19i1.134.
- [4] A. J. H de O, H. P. de, A. J. H de O Luna, and P. Kruchten, "Agile Governance Theory: conceptual development," 2015.
- [5] T. Wira and E. Suryawijaya, "Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia Strengthening Data Security through Blockchain Technology: Exploring

- Successful Implementations in Digital Transformation in Indonesia,” vol. 2, no. 1, pp. 55–67, 2023, doi: 10.21787/jskp.2.2023.55-67.
- [6] S. Lestari and H. Ardiansyah, “Sosialisasi dan Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kampung Pasir Banteng Desa Cihanjawa Kabupaten Purwakarta,” *Al-Ijtima J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 287–296, 2023, doi: 10.53515/aijpkm.v3i2.65.
- [7] V. F. H. N. Reza Nurul Ichsan, Ali Mukti Tanjung, “Pemanfaatan Website Online Single Submission (OSS) dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Medan Berbasis Maqashid Syariah,” *J. Pengabd. Masy. Hablum Minannas*, vol. 2, no. 2, pp. 57–72, 2023.
- [8] L. Lismanto and J. Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi.”
- [9] R. Irnanda and Andriyus, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Rumah Batik Srikandi),” *Pendidik. Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 2, pp. 1589-1599, 2024, [Online]. Available: <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.
- [10] A. J.H.de O.Luna, P. Kruchten, M. L. G. do E.Pedrosa, H. R. d. Almeida Neto, and H. P. d. M. Moura, “State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review,” *Int. J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 6, no. 5, 2014, doi: 10.5121/ijcsit.2014.6510.
- [11] W. Rohmawati and M. E. Atmojo, “Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Sleman Mart,” 2022.
- [12] A. J. H. de O. Luna, P. Kruchten, and H. P. de Moura, “The Conceptual Development of The Agile Governance Theory,” in *Information Systems and Technology Management 2*, 2019.
- [13] R. T. Firdausijah, *Konsep Dasar Manajemen Publik*. 2023.
- [14] Z. Rahman, “A Critical Analysis of Good Governance and Enough Good Governance in Bangladesh .,” vol. 8, no. 5, pp. 204–216, 2023.
- [15] K. P. Hong and P. S. Kim, “Building an agile government: Its possibilities, challenges, and new tasks,” *Halduskultuur*, vol. 21, no. 1, pp. 4–21, 2020, doi: 10.32994/HK.V21I1.235.
- [16] D. Hertati, “Improving the Quality of Public Services through Innovation of Online Complaints Based on the Wargaku Application,” *J. La Soc.*, vol. 4, no. 3, pp. 97–102, 2023, doi: 10.37899/journal-la-sociale.v4i3.831.
- [17] A. D. K. Wardani, I. P. D. Yudharta, and J. P. Lukman, “Agile Governance dalam Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Pajak Daerah (E-Palapa) pada Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung,” *Socio-political Commun. Policy Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–16, 2024, doi: 10.61292/shkr.103.
- [18] S. Dhir and Sushil, *Flexible Strategies in VUCA Markets*. 2018.
- [19] Z. Song, A. R. Mishra, and S. P. Saeidi, “Technological capabilities in the era of the digital economy for integration into cyber-physical systems and the IoT using decision-making approach,” *J. Innov. Knowl.*, vol. 8, no. 2, p. 100356, 2023, doi: 10.1016/j.jik.2023.100356.
- [20] H. Mabizela and Z. Zwane, “Monitoring and evaluation as critical approach to enhance the performance of local government: South Africa,” *Int. J. Res. Bus. Soc. Sci. (2147- 4478)*, vol. 12, no. 7, pp. 74–84, 2023, doi: 10.20525/ijrbs.v12i7.2746.
- [21] M. Janssen and H. van der Voort, “Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic,” *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 55, no. June, p. 102180, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180.